

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate Governance (CG) merupakan konsep yang ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas pada sebuah perusahaan. Konsep *corporate governance* juga merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna meningkatkan kredibilitas terhadap investor yang dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan yang *go public*. *Corporate governance* menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (Hormati 2009).

Masalah tata kelola perusahaan di Indonesia menjadi perhatian yang menarik. Kelemahan di dalam tata kelola perusahaan merupakan salah satu sumber utama terjadinya fraud yang dapat menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara di Asia. Termasuk Indonesia sekitar tahun 1997 dan 1998 (Husnan, 2001). (Miqdad 2012) menyatakan bahwa krisis keuangan di Asia tidak hanya disebabkan oleh hilangnya kepercayaan diri dari investor, tetapi lebih penting

juga disebabkan lemahnya *corporate governance*.

Sebagai contoh, skandal kasus PT Kimia Farma. Kasus PT Kimia Farma dimana pada penerbitan laporan keuangan tahun 2001 PT Kimia Farma melakukan kesalahan yang mendasar yang melibatkan pihak internal perusahaan dengan eksternal auditor. Kesalahan mereka adalah menyajikan laba bersih lebih rendah Rp 32,6 M dari semestinya, kesalahan tersebut akibat dari *overstated* penjualan sebesar 2,7M, dan hal tersebut melibatkan internal perusahaan. Namun pihak eksternal auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Tetapi, pihak KAP terbukti tidak membantu pihak manajemen internal tersebut. Fraud tersebut terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan. Penyebab kasus ini dikarenakan tidak ada hubungan baik antara manajemen dengan shareholder. Oleh karena itu, *good corporate governance* yang menekankan hubungan baik antara manajemen dan shareholder menjadi bagian penting untuk pembenahan pengelolaan korporasi. (<http://davidparsaoran.wordpress.com/2009/11/04/skandal-manipulasi-laporan-keuangan-pt-kimia-farma-tbk/>).

Konsep tata kelola perusahaan atau yang disebut dengan *corporate governance* selain untuk meningkatkan akuntabilitas juga sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi melalui meningkatnya kepercayaan investor. Konsep *corporate governance* melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (OECD 2004).

Sehubungan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, komite audit merupakan salah satu aspek mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Komite audit merupakan sebagai media penghubung antara manajemen dengan eksternal auditor (Carcello and Neal 2003). Untuk menunjukkan integritasnya sebagai fungsi pengawasan, komite audit perlu menampilkan kewajibannya dengan “rajin” melalui frekuensi rapatnya. Menurut Bapepam melalui surat edaran No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Terdapat beberapa aspek penting dari *corporate governance*. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyatakan bahwa dengan adanya keseimbangan hubungan antara komite audit yang berperan dalam mengadakan RUPS, dewan komisaris, dan direksi memiliki peran penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara efektif. Unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang cukup penting adalah *blockholder* yang memiliki saham mayoritas karena mereka dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembuatan keputusan perusahaan. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan maksud dan tujuan perusahaan. Untuk menambah kualitas pengawasan, dibutuhkan dewan komisaris

independen, hal ini sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1-A PT Bursa Efek Indonesia butir 1-a, yang menyatakan bahwa jumlah Dewan Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada. Dewan Komisaris digunakan untuk menambah kualitas pengawasan. Penerapan corporate governance dinyatakan efektif apabila kinerja dewan komisaris dan dewan direksi yang ditunjuk oleh pemegang saham dalam RUPS dapat mencapai tujuan perusahaan dengan efisien.

Untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang baik maka komite audit memiliki peran penting dalam membantu mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan audit eksternal. Komite audit berperan sebagai penghubung komunikasi antara manajemen dengan auditor internal dan eksternal (Carcello and Neal 2003). Komite audit merupakan bagian dari direktur yang independen dengan tanggung jawab atas pengawasan pelaporan keuangan dan audit kepada pihak ketiga (Birkett 1986) dalam (Feng Yin 2011). Komite audit harus dapat menjamin atas keandalan dari laporan keuangan internal perusahaan, dengan pengendalian internal yang kuat sehingga akan menurunkan tingkat resiko secara fungsional. Kedudukan dewan komisaris independen dan komite audit yang dimiliki oleh perusahaan publik memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengawasan. Komite audit memiliki fungsi dan peran audit dalam sebuah perusahaan, terutama hasil laporan keuangan perusahaan untuk dipaparkan ke publik (Amirudin 2004).

Komite audit lebih lanjut diatur dalam Kep-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki

komite audit. Beberapa ketentuan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan melalui rapat komite audit untuk meninjau akurasi pelaporan keuangan atau dan mendiskusikan isu-isu signifikan dengan manajemen. (SUTARYO, PAYAMTA et al. 2010) menunjukkan bahwa frekuensi rapat yang lebih besar berhubungan dengan penurunan insiden masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas audit eksternal. Oleh karena itu rapat komite audit menjadi penting dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

Beberapa penelitian yang meneliti faktor-faktor penentu frekuensi pertemuan komite audit. Salah satunya dalam penelitian (Feng Yin 2011) menyebutkan bahwa terdapat dua faktor utama dalam penerapan *corporate governance* di China, yaitu karena China tidak mewajibkan peraturan tata kelola perusahaan, rapat komite audit cenderung bersifat suka rela. Sehingga peran komite audit diatur oleh pemerintah dan bersifat sukarela. Namun, menurut (Me´ndez 2007) penelitian di Spanyol menemukan bahwa frekuensi pertemuan komite audit menjadi berkurang ketika kepemilikan institusional sebuah perusahaan terkonsentrasi oleh pemegang saham dengan kepemilikan yang besar.

Penelitian tentang tingkat “kerajinan” frekuensi pertemuan komite audit di USA mengungkapkan bahwa tingkat pertemuan komite audit yang sering dapat memberikan efek potensial untuk meningkatkan komunikasi diantara direktur dan auditor, dan dapat membuat kinerja semakin efektif (Rama 2007). Selain itu dia memberi bukti bahwa ukuran perusahaan, ukuran komite audit, persentase

stockblockholder, ukuran dewan direksi, keahlian atau kompetensi akuntansi dan keuangan komite berhubungan dengan frekuensi rapat komite audit.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Giulio Greco di Italia, kepemilikan managerial memiliki korelasi negatif terhadap frekuensi pertemuan komite audit. Penelitian ini menjelaskan bahwa rapat komite audit berhubungan dengan struktur kepemilikan, karakteristik dewan komisaris, dan teori keagenan yang beranggapan bahwa kepemilikan managerial menggantikan fungsi kontrol oleh manajemen. Direksi cenderung leluasa untuk aktif mencari informasi dari pada perusahaan dengan kepemilikan institusional (Greco 2011). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sharma di New Zeland senada dengan Feng Yin, dimana New Zeland tidak mewajibkan peraturan tata kelola perusahaan, rapat komite audit cenderung bersifat suka rela. (Sharma, Naiker et al. 2009) menjelaskan bahwa rapat komite audit merupakan indikator penting dalam tingkat efektifitas komite audit.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian di Indonesia terkait faktor penentu frekuensi rapat komite audit masih terbatas. Tidak adanya pedoman pasti dan kurangnya bukti penelitian terkait faktor penentu frekuensi rapat komite audit ini memberikan motivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Determinan Faktor Frekuensi Pertemuan Komite Audit**” untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang mempengaruhi intensitas komite audit dalam melakukan pertemuan dalam tiga bulan sekali selama satu tahun. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur *go-public* yang terdaftar di Indonesia periode 2012-2013.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap frekuensi pertemuan komite audit?
2. Apakah tingkat keahlian akuntansi komite audit berpengaruh terhadap frekuensi pertemuan komite audit?
3. Apakah kualitas eksternal auditor berpengaruh terhadap frekuensi pertemuan komite audit?
4. Apakah tingkat independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap frekuensi pertemuan komite audit?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap frekuensi pertemuan komite audit?
6. Apakah tingkat leverage perusahaan berpengaruh terhadap frekuensi pertemuan komite audit?
7. Apakah tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap frekuensi pertemuan komite audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap frekuensi pertemuan komite audit
2. Untuk menguji pengaruh tingkat keahlian akuntansi komite audit terhadap frekuensi pertemuan komite audit
3. Untuk menguji pengaruh kualitas eksternal auditor terhadap frekuensi pertemuan komite audit
4. Untuk menguji pengaruh tingkat independensi dewan komisaris terhadap frekuensi pertemuan komite audit
5. Untuk menguji pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap frekuensi pertemuan komite audit
6. Untuk menguji pengaruh tingkat *leverage* terhadap frekuensi pertemuan komite audit
7. Untuk menguji pengaruh tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap frekuensi pertemuan komite audit

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai aspek *corporate governance* yang berkaitan dengan keberadaan komite audit pada perusahaan korporasi di Indonesia.

2. Bagi kebijakan

3. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terhadap peran komite audit pada perusahaan korporasi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisa

Penelitian dengan judul “Determinan Faktor Frekuensi Pertemuan Komite Audit” disusun dengan kerangka sistematika penulisan yang ditentukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Universitas Airlangga Surabaya.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tujuan Pustaka

Bab ini berisi teori yang mendasari penelitian yang meliputi, pembahasan tentang Good Corporate Governance, komite audit, pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu serta kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai populasi penelitian, penentuan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel dan metode analisis data

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi masing-masing variabel serta pembuktian hipotesis dan analisisnya.

BAB V Simpulan dan Saran

Bab ini membahas mengenai simpulan dan saran hasil pembahasan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepenting